

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

[401411]

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TA 2020



Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Ringinanom
Nganjuk - Jawa Timur 64419
Telp. (0358) 323744
e-mail : panganjuk@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TA 2020

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

**BAGIAN ANGGARAN 005.04
DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Gatot Subroto Kelurahan Ringinanom
Telp. (0358) 323744
Nganjuk - Jawa Timur 64419
e-mail : panganjuk@gmail.com**

KATA PENGANTAR

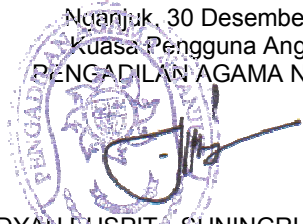
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Nganjuk adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pengadilan Agama Nganjuk yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Nganjuk. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Nganjuk, 30 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
PENGADILAN AGAMA NGANJUK



DYAN PUSPITA SUNINGRUM, S.H., M.H.
NIP. 19751103 200805 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
RINGKASAN	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	viii
NERACA	ix
LAPORAN OPERASIONAL	x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM.....	1
A.1 Dasar Hukum.....	1
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Nganjuk	2
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran.....	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan.....	12
B.2 Belanja Pegawai	14
B.3 Belanja Barang	14
B.4 Belanja Modal	15
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	16
B.4.3 Belanja Modal Lainnya	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	18
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	18
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	18
C.3 Piutang Bukan Pajak	18
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	19
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).....	19
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi.....	20
(TGR).....	20
C.7 Persediaan.....	20
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister	21
C.9 Tanah.....	21
C.10 Peralatan dan Mesin.....	22
C.11 Gedung dan Bangunan	22

C.13 Aset Tetap Lainnya	22
C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan	23
C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	24
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR	24
C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	25
C.18 Aset Tak Berwujud.....	25
C.19 Aset Lain-Lain	25
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga	26
C.23 Uang Muka dari KPPN.....	27
C.24 Ekuitas	27
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	28
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	28
D.2 Beban Pegawai.....	28
D.3 Beban Persediaan	29
D.4 Beban Barang dan Jasa	29
D.5. Beban Pemeliharaan	30
D.6 Beban Perjalanan Dinas.....	30
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	32
D.9 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	32
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	33
E.1 Ekuitas Awal	33
E.2 Defisit LO	33
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	33
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	33
E.5 Koreksi Lain-lain	33
E.6 Transaksi Antar Entitas	33
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	34
E.6.2 Transfer keluar	34
E.7 Ekuitas Akhir	34
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	35
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	35
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	35
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	12
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	13
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2020	13
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	14
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	14
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	15
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	15
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	16
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	16
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	17
Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020	18
Tabel 12. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>) Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020	18
Tabel 13. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020	19
Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020	19
Tabel 15. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020	20
Tabel 16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2020	20
Tabel 17. Rincian Persediaan	21
Tabel 18. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24
Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
Tabel 20. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	28
Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	29
Tabel 22. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	29
Tabel 23. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	30
Tabel 24. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	30
Tabel 25. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	31

Tabel 26. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	31
Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	32
Tabel 28. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	33

Pengadilan Agama Nganjuk

Jalan Gatot Subroto Kelurahan Ringinanom
Telp. 0358-323744 e-mail : panganjuk@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Semester III Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2020 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Nganjuk telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nganjuk, 30 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran


DYAH PUSPA SUNINGRUM, S.H., M.H.
NIP. 196312241984031001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Semester III Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 31 Desember 2020 s.d 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 246.692.000,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 152.229.000,00 atau mencapai 61,7 %.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 47.487.000,00 atau mencapai 99,97% dari alokasi anggaran sebesar Rp.47.500.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 12.210.264,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 12.210.264,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 12.210.264,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 194.243.445,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 52.543.694,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional nilai Rp. 141.699.751,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp 141.699.751,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 12.210.264 dikurangi surplus-LO sebesar Rp 141.699.751,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA NGANJUK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	152.229.000,00	246.692.000,00	162,05	121.294.000,00	223.482.100,00	184,25
Jumlah Pendapatan		152.229.000,00	246.692.000,00	162,05	121.294.000,00	223.482.100,00	184,25
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Barang	B.3	47.500.000,00	47.487.000,00	99,97	47.500.000,00	47.254.000,00	99,48
3. Belanja Modal	B.4	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		47.500.000,00	47.487.000,00	99,97	47.500.000,00	47.254.000,00	99,48

NERACA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK
NERACA
PER 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2020

NAMA PERKIRAAN 1	CATATAN 2	JUMLAH	
		30-Jun-20 3	31-Des-20 4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	C. 5	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	-
Persediaan	C. 7	8.635.654	12.210.264
Persediaan yang Belum Diregister	C. 8	-	-
Jumlah Aset Lancar		8.635.654	12.210.264
Aset Tetap			
Tanah	C. 9	0	-
Peralatan dan Mesin	C. 10	-	-
Gedung dan Bangunan	C. 11	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 12	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 13	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 14	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 15	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 16	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 17	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 18	-	-
Aset Lain-Lain	C. 19	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 20	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		8.635.654	12.210.264
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 21	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 22	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 23	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C. 24	8.635.654	12.210.264
JUMLAH EKUITAS		8.635.654	12.210.264
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		8.635.654	12.210.264

LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN AGAMA NGANJUK
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	30 DESEMBER 2019
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		246.692.000	223.482.100
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	246.692.000	223.482.100
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	5.056.694	5.780.667
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	34.467.000	34.234.000
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	-	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	13.020.000	13.020.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	-	-
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		52.543.694	53.034.667
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		194.148.306	170.447.433
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		194.148.306	170.447.433

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA NGANJUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31-Dec-19
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	12.210.264,00	11.029.254
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	194.243.445,00	170.903.745
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		-	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	-	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	(76.748.500,00)	(71.135.300)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		117.494.945,00	99.768.445,00
EKUITAS AKHIR	E. 7	129.705.209,00	110.797.699

Formatted: Font: (Default) Arial, 8
pt, Finnish (Finland)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Nganjuk dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.657/SEK/SK/X/2018 mengenai Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Nganjuk

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama
Nganjuk*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Rencana Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024.

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Visi dan Misi Pengadilan Agama Nganjuk

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Agama Nganjuk:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Nganjuk yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Nganjuk sebagai Visi dan Misinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Nganjuk melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

Pelaksanaan dan Perencanaan sudah berbasis kinerja dan Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama, Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, meningkatkan pengawasan dan pembinaan, mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Kebijakan Akuntansi

Basis AkruaI

A.4. KEBUJUKAN AKUNTANSI

A.4

A.4 Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Nganjuk menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Nganjuk dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Nganjuk. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Bold, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatandisajikan menurutklasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TA 2020
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

ebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TA 2020
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Nganjuk tidak pernah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini disebabkan kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	30 JUNI 2020	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	152.229.000	-
Jumlah Pendapatan	152.229.000	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	47.500.000	-
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	47.500.000	-

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp110.445.500,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 246.692.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 DESEMBER 2020		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	82.190.000,00	90.555.000,00	110,18
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	70.039.000,00	156.137.000,00	222,93
Jumlah Pendapatan Bruto		152.229.000,00	246.692.000,00	162,05
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		152.229.000,00	246.692.000,00	0,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 23.209.900,00 atau 10% dibandingkan realisasi

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

periode 31 Desember 2019.

Perbandingan realisasi PNBP Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	90.555.000,00	83.240.000,00	7.315.000,00	8,79
425239	Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya	156.137.000,00	140.242.100,00	15.894.900,00	11,33
Jumlah Pendapatan Netto		246.692.000,00	223.482.100,00	23.209.900,00	10,39

Realisasi
Belanja
Negara
Rp33.697.000.00
0,00

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Nganjuk pada periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 47.487.000,00 atau 99,97 % dari anggaran belanja sebesar Rp 47.500.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Realisasi belanja periode 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 233.000,00 atau sebesar 99,5% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2020. Hal ini antara lain disebabkan :

1. Kegiatan Sidang Keliling dan Bantuan Biaya Perkara Kepada Para Pihak sudah terealisasi semua di Semester II.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-
52	Belanja Barang	47.487.000,00	47.254.000,00	233.000,00	0,49
53	Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Netto		47.487.000,00	47.254.000,00	233.000,00	0,49

Belanja
Pegawai
Rp0,00

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	30 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

Belanja
Barang
Rp33.697.000,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 47.487.000,00 dan Rp 47.254.800,00

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TA 2020
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp 233.00,00 atau 99,5% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2019. Kenaikan ini diakibatkan realisasi sampai 31 Desember 2020 untuk sidang keliling dan bantuan biaya berpekerja sudah terealisasi 100%. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	(Rp)	%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.987.000,00	5.758.000,00	229.000,00	3,98
Belanja Bahan	450.000,00			
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	300.000,00			
Beban Sewa	3.730.000,00	4.476.000,00	(746.000,00)	100,00
Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	13.020.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00	100,00
Belanja Honor Output Kegiatan			(360.000,00)	100,00
Beban Jasa Konsultansi	24.000.000,00	23.640.000,00	-	-
Realisasi Belanja Bruto	47.487.000,00	40.384.000,00	7.103.000,00	17,59
Pengembalian			-	-

Belanja
Modal Rp0,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2019 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2020	31-Des-19	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TA 2020
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31-Des-20	31 Desember 2019	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31-Des-20	31 Desember 2019	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Jang Persediaan	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 12. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	-	-	-
	JUMLAH	-	-

Piutang Bukan
Pajak Rp0,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap

pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 13. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
6.		-	-
7.		-	-
JUMLAH		-	-

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih–Piutang
Bukan Pajak
Rp0,00

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi
Rp0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar pada Pengadilan Agama Nganjuk berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Formatted: Font: Arial, 8 pt, Font color: Auto

**Tabel 15. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR)
Rp0,00

No	Uraian	30 Juni 2020	TA 2019
	-	-	-
	JUMLAH	-	-

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

**Tabel 16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Persediaan
Rp8.635.654,00

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 12.210.264,00 dan Rp 11.029.254,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 1.181.010,00 atau 10,70%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Formatted: Font: Arial, 8 pt, Font color: Auto

Tabel 17. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

Persediaan yang
belum diregister
Rp.0

No	Uraian	31-Des-19	Mutasi	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	11.029.254,00	1.181.010,00	12.210.264,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		11.029.254,00	1.181.010,00	12.210.264,00

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : W13-A22/3211/KS.00/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp0,00 dan tidak disajikan dalam neraca pada persediaan.

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Adapun rincian atas persediaan yang belum diregister adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
	NIHIL	-
		-
	Total	-

Tanah Rp0,00

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Nganjuk per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

31 Desember 2019	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	0,00



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TA 2020
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Peralatan
dan Mesin
Rp0,00

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	-
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Aset Tetap
Lainnya
Rp0,00

C.13 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	-
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,00

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja dibawah lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 31 Desember 2019	-
Perolehan KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2020	-

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 terjadi Penurunan sebesar Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 18. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Piutang
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya. Piutang Tagihan pada Pengadilan Agama Nganjuk berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	NIHIL	-	-
	JUMLAH	-	-

Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih -
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00.

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1.	NIHIL	-	-	-	-
	Total		-		-

Aset Tak
Berwujud
Rp0,00

C.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Aset Lain-
Lain Rp0,00

C.19 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Nganjuk serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

20	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp0,00

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Utang
Kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1		0	-
2		0	-
3		0	-
		0	

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah
	NIHIL	

*Uang muka
dari KPPN
Rp0,00*

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.24 Ekuitas

*Ekuitas
Rp8.635.654,00*

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 12.210.264,00 dan Rp11.029.254,00 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP
Rp110.445.500,0
0

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 246.692.000,00 dan Rp 223.482.100,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 20. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 JUNI 2020	30 JUNI 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBPN Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
425233	Pendapatan Ongkos perkara	42.040.000,00	39.340.000,00	6,86
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	68.405.500,00	53.005.100,00	29,05
		0,00	0,00	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	-
Total		110.445.500,00	92.345.100,00	19,60

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp0,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	-
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	-
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0,00	0,00	-
4	Beban Tunj. Anak PNS	0,00	0,00	-
5	Beban Tunj. Struktural PNS	0,00	0,00	-
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	0,00	0,00	-
7	Beban Tunj. PPh PNS	0,00	0,00	-
8	Beban Tunj. Beras PNS	0,00	0,00	-
9	Beban Uang Makan PNS	0,00	0,00	-
10	Beban Tunjangan Umum PNS	0,00	0,00	-
11	Beban Uang Lembur	0,00	0,00	-
12	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	-
Total		0,00	0,00	-

Beban Persediaan
Rp2.393.600,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.393.600,00 dan Rp3.525.298,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 22. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	12.210.264,00	11.029.254,00	10,71
Total		12.210.264,00	11.029.254,00	10,71

Beban Barang dan
Jasa
Rp20.677.000,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 34.467.000,00 dan Rp 34.234.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Tabel 23. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	360.000,00	100,00
2	Beban Barang Non Operasional Lainnya	6.287.000,00	5.758.000,00	9,19
3	Beban Jasa Konsultan	24.000.000,00	23.640.000,00	1,52
4	Beban Sewa	3.730.000,00	4.476.000,00	100,00
	Total	34.017.000,00	34.234.000,00	(0,63)

Beban Pemeliharaan
Rp0,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31-Des-19	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	-
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	-
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	-
	Total	0,00	0,00	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp13.020.000,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 13.020.000,00 dan Rp 13.020.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	30 Juni 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	0,00	0,00	-
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	13.020.000,00	13.020.000,00	-
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0,00	0,00	-
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0,00	0,00	-
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	-
	Total	13.020.000,00	13.020.000,00	-

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp0,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih 0

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	-
Jumlah Penyusutan		0,00	0,00	-
1	Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	-
2	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	-
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	-
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	-
Total		0,00	0,00	-

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertahiran piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp456.312,00

Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
3	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-	-
4	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-	-
Total		-	-	-

D.9 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Tabel 28. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
2	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	-
6	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	95.139,00	456.312,00	(79,15)
7	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	-	-	-
Total		95.139,00	456.312,00	(79,15)

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp11.029.254

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.029.254,00 dan Rp 12.210.264,00.

Surplus/Defisit
LO
Rp74.354.900,00

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 194.243.445,00 dan Rp 170.903.745,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp 0

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp0,00

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi lain-
lainRp0,00

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Transaksi Antar
Entitas
Rp(76.748.500,
00)

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(76.748.500,00) dan Rp(67.610.002,00). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	33.697.000,00
Diterima dari Entitas Lain	(110.445.500,00)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
	(76.748.500,00)

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp(110.445.500,00) sedangkan DKEL sebesar Rp33.697.000,00.

E.6.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp8.635.654,00 Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 12.210.264,00 dan Rp 11.029.254,00.

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2020 pada Pengadilan Agama Nganjuk yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2020.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI setelah tanggal neraca per 31 Desember 2020 pada Pengadilan Agama Nganjuk yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2020

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Nganjuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Nganjuk Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2020 rekening tersebut sebagai berikut:

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran Dipa 04

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Tanggal Pembukaan Rekening
1	BPG : 034 PENGADILAN AGAMA NGANJUK (DIPA 05.04)	BRI Cabang Nganjuk 0056-01-001322-30-3	24 April 2015

Untuk Penampungan biaya perkara di Satuan Kerja Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai rekening lainnya yaitu:

Rincian Rekening Lainnya

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Tanggal Pembukaan Rekening
1	RPL 034 PA Nganjuk Utk PDT Biaya Perkara	BRI Cabang Nganjuk 0056-01-000549-30-0	10 Agustus 2015



**LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TA 2020
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Penunjukkan Bendahara Pengeluaran, Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Nganjuk Nomor W13-A22/006/KU.01/SK/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan, dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Nganjuk Nomor W13-A22/04/KU.01/SK/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 telah menunjuk :

Kuasa Pengguna Anggaran : Dyah Puspita Suningrum,S.H.,M.H.

Pejabat Pembuat Komitmen : Muhammad Nafi,S.H.,M.HI..

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Iffah Lathifah,S.E.

Bendahara : Dedi Ardabili,S.Ag.

LAMPIRAN A.1
TABEL PENYUSUTAN PER 31 Desember 2020

KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK.PENYUSUTAN PER 31 Desember 2019	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK.PENYUSUTAN PERIODE INI	TOTAL AK.PENYUSUTAN PER 31 Desember 2020	NILAI BUKU PER 31 Desember 2020
					NIHIL				

Formatted: Font: (Default) Arial, 8
pt, Finnish (Finland)

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 Desember 2020

No	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
														Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
								NIHIL								

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)

LAMPIRAN A.3 HIBAH

PENGADILAN AGAMA NGANJUK
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA JASA
PER 31 Desember 2020

No	Nama Pemberi	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
				NIHIL			

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Finnish (Finland)